

ABSTRAK

Di dalam Pemilu Serentak pada tahun 2019 di Banjarmasin dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik itu yang terekspos oleh media maupun masih sebatas buah bibir masyarakat adalah menjadi kewajiban Bawaslu untuk meresponnya.. Di antaranya berujung pada proses di Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin baik itu merupakan laporan masyarakat maupun temuan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin sendiri. Kasus-kasus yang terjadi tersebut tidak hanya terjadi sebelum masa kampanye, bahkan pada tahapan masa kampanyepun yang masa tersebut dilegalkan para calon legislatif untuk berkreatifitas memikat dukungan para konstituen pemilih, juga terjadi berbagai kasus tindak pidana Pemilu. Padahal partai politik sudah mendapat penjelasan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin tentang hal apa saja yang diboleh dan hal apa saja yang dilarang pada masa kampanye. Berdasarkan hal tersebutlah penelitian ini dilakukan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa: (1) sebab diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, (2) penegakan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye Pemilihan Umum 2019 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, serta (3) faktor yang menghambat dan solusinya bagi Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye pada pemilu 2019.

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi penelitian adalah seluruh komisioner, staff dan petugas Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposif non Random Sampling*. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan intepretasi data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Banjarmasin diperlukan untuk mengawal dan menjaga penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil di Kota Banjarmasin; (2) Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu pada masa kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal; (3) Faktor-faktor yang menghambat Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye di Banjarmasin pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah faktor norma hukum, faktor anggaran, faktor SDM dan faktor faslitas, kemudian solusi terhadap berbagai hambatan itu adalah memaksimalkan upaya pencegahan dan memperkuat anggaran, melakukan rekrutmen SDM dan melengkapi fasilitas Bawaslu Kota Banjarmasin.

Kata kunci: *Penegakan hukum, tindak pidana Pemilu, Bawaslu Banjarmasin*

ABSTRACT

In the simultaneous elections in the year 2019 in Banjarmasin alleged violation of criminal acts of the elections, both of which are exposed by the media and still limited to the fruit of the lips of society is the obligation bawaslu to respond. . Among them culminate in the process at Gakkumdu Bawaslu Banjarmasin City Whether it is the report of the community and the findings by the BAWASLU Banjarmasin itself. These cases did not only occur before the campaign period, even at the stage of the kampanyepun period that time legalized by the legislature to creativity captivate the support of voters constituency, also occurred various cases Election criminal act. In fact, the political party has been explained by the Bawaslu Banjarmasin City about what is allowed and what is forbidden at the time of the campaign. It is based on what this research is doing.

The purpose of this research is to know and explain and analyze: (1) the reason for his needfor theLaw on election crimes by Ba waslu, (2) Law enforcement against crimes at the time of the 2019 election campaign by the Bawaslu of Banjarmasin City, as well as (3) factors Impeding and solution for Bawaslu City Banjarmasin to enforce the law against criminal acts at the 2019 election.

This research is a sociological juridical approach , with a type of research that is descriptive analytical. The Data source used is primary data and secondary data. The research population is the entire Commissioner, staff and officers of the City bawaslu Banjarmasin. The sampling technique used is *Purposif non Random sampling*. Data Collection Techniques using observation techniques, interviews, and documentation, which are then processed by editing techniques, clarifications and data interpretation. The Data obtained in this study inanalysis with qualitative descriptive methods inductive using law enforcement theory and Justice theory.

The results of this study are: (1) The law enforcement of election crimes by Bawaslu Banjarmasin City is required to control and maintain the integrity, honest and fair elections in Banjarmasin City; (2) Law enforcement on election criminal at the time of the campaign at the simultaneous elections of the year 2019 by Bawaslu Banjarmasin City has been implemented optimally and optimally; (3) Factors that inhibit the Bawaslu of Banjarmasin in enforcing the law against the election crimes at the campaign period in Banjarmasin in the concurrent elections of the year 2019 is a factor of legal norms, budget factors, HR factors and factors of , then the solution to the various obstacles is to maximize prevention and strengthening the budget, conducting HR recruitment and completing the facility of the Bawaslu Banjarmasin city.

Keywords: *Law enforcement, criminal offence election, Bawaslu Banjarmasin*